

POLITIK TRANSAKSIONAL DAN PRAGMATISME MASYARAKAT DALAM DEMOKRASI MODERN

Satryo Pringgo Sejati¹, Ahmad Burhan Hakim²

¹ Universitas Papua, Indonesia

²Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia,
Email : s.sejati@unipa.ac.id ¹), burhanhakim@insud.ac.id ²)

Abstract : Democracy is a political concept that is widely used by many countries in the world today. Ideas about people's welfare are the main focus in the concept of political order in democracy. So the term democracy has become familiar to hear today. On the other hand, transactional politics is something that is often found in democracy implemented in Indonesia. This also sparked an act of political pragmatism in Indonesian society. So democracy experiences a shift in its agenda which has an impact on the quality of democracy itself. The research method used in this paper is qualitative research using a social science approach that has developed with today's modern political sciences. We also use research libraries to make it easier for us to manage data that we find and that we consider relevant. These transactional political actions are related to the attitude of the main political interest in the form of power, while the culture of political pragmatism in Indonesian society is more visible due to the relatively low level of education in Indonesian society.

Keywords: *Democracy, Transactional, Pragmatism*

Abstrak : Demokrasi adalah salah satu konsep politik yang banyak digunakan oleh banyak negara di dunia saat ini. Ide-ide tentang kesejahteraan rakyat menjadi fokus utama dalam konsep tatanan politik dalam demokrasi. Sehingga istilah demokrasi menjadi familiar untuk didengar hari ini. Disisi lain adanya politik transaksional menjadi suatu hal yang banyak ditemui dalam demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Hal ini juga menyulut suatu tindakan pragmatisme politik dalam masyarakat Indonesia. Sehingga demokrasi mengalami pergeseran agenda yang mana hal berdampak pada kualitas demokrasi itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yakni penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial yang berkembang dengan ilmu-ilmu politik modern saat ini. Kami juga menggunakan library research untuk memudahkan kami dalam mengelolada data yang temuka temukan dan kami anggap relevan. Tindakan politik transaksional tersebut berhubungan dengan sikap kepentingan politik utama berupa kekuasaan sedangkan budaya pragmatisme politik dalam masyarakat Indonesia lebih terlihat karena adanya faktor pendidikan yang relatif rendah pada masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : *Demokrasi, Transaksional, Pragmatisme*

A. Pendahuluan

Masyarakat menjadi bagian penting dalam proses demokratisasi yang terjadi pada suatu negara. Masyarakat punya posisi dan pengaruh yang kuat dalam menentukan demokrasi itu sendiri, sehingga peran masyarakat menjadi penting adanya. Salah satunya yakni civil society yang kemudian sebagai bagian penting dari proses demokrasi tersebut. Masyarakat juga punya kemampuan yang luar biasa dalam menentukan siapa dan bagaimana seorang pemimpin tadi bisa menjadi seorang pimpinan dalam dinamika dan politik demokrasi di sebuah negara tak terkecuali Indonesia.¹ Baik pemilihan anggota legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres), Pemilihan kepada daerah (pilkada) baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan bahkan sampai tingkat pemilihan kepala desa (pilkades).

Namun dari perlehatan demokrasi tersebut ada suatu hal yang kemudian tidak bisa dihindari salah satunya yakni adanya praktik politik transaksional. Dimana politik transaksional berarti adanya suatu praktik atau tindakan politik berupa tukar menukar atau timbal balik berupa suatu transaksi yang kemudian melibat objek dan subjek dalam politik dan demokrasi. Secara sederhana bisa diartikan bahwa politik transaksional hamper sama dengan istilah money politik, namun lebih luas karena tidak hanya melibat persoalan uang dan lain-lain. Tiap pemilu dalam hamper semua tingkatan baik pusat, daerah sampai desa hal ini sering terjadi, karena ada suatu transaksi yang harus di jalankan oleh kandidat tertentu untuk memperoleh suara politik yang dibutuhkan dalam pemilu². Terkadang hal semacam ini sudah menjadi wajar adanya, sehingga menyerupai suatu konsep rahasia umum memang sudah banyak diketahui oleh masyarakat itu sendiri.

Hanya saja perjalanan politik transaksional tadi berjalan beriringan dengan budaya pragmatism politik dalam masyarakat kita. Maksudnya bahwa masyarakat melakukan tindakan pragmatis atas politik transaksional yang terjadi dan masyarakat tersebut mejadi subjek dan objek dalam prgamatisme politik. Pragmatism politik berarti suatu tindakan yang berdasar materi dan ukurannya yakni persoalan untung dan rugi. Sehingga hal ini menjadi suatu sisi mata uang dalam demokrasi yang memang sulit untuk dihindari.³ Walaupun tidak semua masyarakat punya pemikiran yang demikian. Hanya saja secara jelas memang haru ini banyak terjadi di masyarakat kita. Namun inilah yang kemudian menjadoi resiko nyata dalam sebuah perhelatan pemilu dalam demokrasi modern.

Dalam pendekatan politik transaksional dan pragmatis tadi memunculkan konsep nyata dengan adanya politik biaya tinggi atau *high cost politics* yang tidak bisa dihindari dan hal ini seperti virus yang kemudian memabah dari semua tingkatan baik pusat, daerah sampau desa. Dengan demikian hal-hal seperti ini membuat para politisi kita juga punya tindakan pragmatis karena biaya yang dikeluarkan dalam pemilu yang cuku tinggi. Agaknya kondisi bahkan budaya seperti ini sulit untuk dhilangkan di Indonesia untuk beberapa tahun terakhir. Karena persoalan pragmatism politik masyarakat Indonesia juga berhubungan erat dengan budaya politik transaksional yang menjadi salah satu nyawa demokrasi di Indonesia.

¹ Hadiwinata, B. S. (2005). Civil Society: Pembangun dan Sekaligus Perusak Demokrasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 9(1), 1-22.

² Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di indonesia. Notarius, 13(1), 138-153.

³ Liata, N. (2020). Relasi pertukaran sosial antara masyarakat dan partai politik. Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI), 1(1), 79-95.

B. Metode

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan basis pencarian data dengan menggunakan studi kajian pustaka atau *library research*. Kami melakukan penelitian pada proses politik transaksional dan perilaku pragmatism masyarakat dalam pemilu yang memang beberapa waktu terakhir menjadi suatu persoalan yang sulit untuk dihilangkan. Dengan menggunakan *library research* maka data sekunder yang kami dapatkan bisa diperoleh dari buku, bahan ajar, laporan penelitian yang kami anggap relevan, sedangkan pendekatan dalam penelitian ini yakni pada basis atau rumpun ilmu sosial dan politik. Kami mencoba untuk menganalisis dan mendeskripsikan persoalan sosial yang terjadi di masyarakat sebagai bagian nyata dalam pelaksanaan demokrasi yang selama ini dilaksanakan di Indonesia.

C. Temuan Data dan Diskusi

1. Politik Transaksional dan Resiko Demokrasi Modern

Sejak Indonesia memasuki era reformasi, banyak perubahan fundamental telah mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan yang paling signifikan terjadi pada sistem tata kelola pemerintahan dengan diterapkannya sistem *check and balances* (pengawasan dan kesamaan kedudukan) dalam menjalankan fungsi dan wewenang di antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun pelaksanaan reformasi yang sejatinya bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) dan transparan ternyata masih dihadang oleh kendala lemahnya moral oknum pejabat negara yang mudah tergoda oleh faktor uang untuk kepentingan memperkayadiri sendiri.⁴

Politik transaksional merupakan suatu pembagian kekuasaan politik atau pemberian dalam bentuk barang, uang, jasa, maupun kebijakan tertentu yang bertujuan untuk mempengaruhi seorang atau lebih dan untuk mendapatkan keuntungan tertentu berdasarkan kesempatan politik yang dibuat oleh beberapa partai politik atau elite politik. Di Indonesia Politik transaksional lebih dikenal sebagai istilah yang lebih diidentikan dengan pemilu. Politik transaksional diartikan sebagai pemberian janji tertentu dalam rangka mempengaruhi pemilih. Namun, dari banyaknya definisi yang ada, Politik transaksional merupakan istilah orang Indonesia untuk menerangkan semua jenis praktik dan perilaku korupsi dalam pemilu mulai dari korupsi politik, membeli suara (*vote buying*) hingga kegiatan haram (*racketeering*).⁵ Politik transaksional berarti politik dagang, ada yang menjual dan ada yang membeli. Tentu semuanya membutuhkan alat pembayaran yang ditentukan bersama. Jika dalam jual-beli, maka alat pembayarannya biasanya berupa uang tunai. Pada praktik politik, jika terjadi politik transaksional, ada yang memberi uang dan ada yang menerima uang dalam transaksi politik tersebut.⁶ Meskipun begitu, tidak selalu uang yang digunakan dalam transaksi politik, dalam beberapa kasus politik, politik transaksional juga berkaitan dengan jabatan dan imbalan tertentu di luar uang

Menurut Jeremy Boissevain, transaksional adalah menjelaskan hubungan pertemanan atau persaudaraan dalam setiap pendekatan untuk memenuhi permintaan. Faktor persahabatan

⁴ H.M. Abdul Kholiq, *Perilaku Politik Transaksional (Menggagas Fenomena Praktek Politik Uang Dalam Pemilu)*, h. 86. <http://manarulquran.unsiq.ac.id/index.php/manarul/article/view/15>. (Diakses 10 Januari 2024).

⁵ Solihah, R. (2016). Politik transaksional dalam pilkada serentak dan implikasinya bagi pemerintahan daerah di Indonesia. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1), 97-109.

⁶ MARETHA, T. A. (2020). *POLITIK TRANSAKSIONAL DAN RASIONALITAS PEMILIH DALAM PILPRES 2019 DI KECAMATAN KARANGNUNGGAL* (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).

adalah penting dan jadi keutamaan. Pada kondisi tertentu pendekatan transaksional meletakkan peran individu lebih dominan, dan tidak terikat kepada peraturan atau sistem.⁷ Menurut Jeremy Boissevain dalam Nizam Sulaiman pendekatan transaksional terdapat pada peraturan normatif dan peraturan pragmatif. Peraturan normatif adalah menggariskan panduan umum terhadap tingkah laku anggota masyarakat, membentuk peraturan umum yang formal dan unggul dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud peraturan pragmatik adalah peraturan permainan atau tidak melanggar norma.⁸

Adapun politik transaksional secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau doorprize, pembagian sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan tertentu dan sebagainya. Para calon bahkan tidak bisa menghitung secara persis berapa dana mereka habiskan untuk sumbangan, hadiah, spanduk, dan sebagainya, di samping biaya resmi untuk pendaftaran keanggotaan, membayar saksi, dan kebutuhan administratif lainnya.⁹ Demokrasi sejatinya memang tidak bisa dilepaskan dari proses-proses transaksi. Artinya ada pertukaran darisatu pihak kepada pihak lainnya. Namun proses transaksi dalam demokrasi yang sehat mengambil wujud pertukaran visi misi, ideologi, program maupun platform kontestan politik dengan dukungan pemilih

Transisi demokrasi di Indonesia, berbagai fenomena praktik Pemilihan Umum dan Pilkada lahir tidak mencerminkan asas-asas demokratis. Salah satu praktik tersebut adalah politik transaksional. Maraknya praktik politik transaksional berlangsung bukan saja terjadi pada tataran Pilkada tapi hampir seluruh tingkatan pemilihan umum baik pemilihan presiden begitu juga pada pemilihan anggota legislatif, sehingga menjadikan demokrasi dengan biaya yang cukup tinggi. Dengan praktik tersebut, maka tingkat kepercayaan terhadap kandidat mendorong relasi antara calon dan pemilih bersifat jangka pendek dan materialis. Pada akhirnya politik transaksional menjadi salah satu faktor penyebab demokrasi berbiaya tinggi.¹⁰ Politik transaksional bukan merupakan suatu hal yang baru dalam sistem demokrasi di Indonesia, akan tetapi merupakan sebuah warisan dari pemilihan tak langsung dan lahir di tengah-tengah masyarakat yang notabene sangat bertentangan dengan regulasi baik Undang-Undang maupun hukum Islam.¹¹

2. Pragmatisme Masyarakat dalam Demokrasi Modern

Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani *pragma* berarti perbuatan (action) atau tindakan (practice). Isme berarti ajaran, aliran, paham. Dengan demikian, pragmatisme berarti ajaran/aliran/paham yang menekankan bahwa pemikiran itu mengikuti tindakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pragmatisme berarti kepercayaan bahwa kebenaran atau nilai suatu ajaran (paham/doktrin/gagasan/pernyataan/dsb) bergantung pada penerapannya bagi kepentingan manusia. Sedangkan pragmatis berarti bersifat praktis dan berguna bagi umum; bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan); mengenai/bersangkutan dengan nilai-nilai praktis. Karena itu,

⁷ Djauhari. 2011. "Problematisasi Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Dalam perspektif Sosiologis)". Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011. Fitriyah. 2012. "Fenomena Politik Uang dalam Pilkada". Jurnal Politik Vol. 3, No. 1 April 2012.

⁸ Ghifari, M. S., & Sari, C. M. A. (2019). PRAKTIK POLITIK TRANSAKSIONAL PADA SISTEM DESENTRALISASI ASIMETRIS DI ACEH (Studi Analisis 10 Tahun Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Periode 2008/2018). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 4(3).

⁹ Pagala, H. A., & SHI, M. (2021). Politik Transaksional. Bening Media Publishing. Hal. 45-47

¹⁰ AAGN Ari Dwipayana, "Demokrasi Biaya Tinggi. Dimensi Ekonomi Dalam Demokrasi Elektoral di Indonesia Pascasar Orde Baru", Jurnal FISIPOL UGM, Vol. 12 No. (3 Maret 2009), h. 267. <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10971>. (Diakses 12 Agustus 2018). Lihat juga. Agus Rahardjo, "Biaya Politik Tinggi Penyebab Demokrasi transaksional"

¹¹ Hasbi Ash-Shiddiqi, Koleksi Hadis Hukum, Juz IX (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 457-459.

pragmatisme memandang bahwa kriteria kebenaran ajaran adalah faedah atau manfaat. Suatu teori atau hipotesis dianggap oleh pragmatisme benar jika membawa suatu hasil. Dengan kata lain, suatu teori itu benar jika berfungsi. Jadi, pragmatisme dapat dikategorikan ke dalam pembahasan mengenai teori kebenaran.

Secara aplikatif, budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitnya. Seperti juga di Indonesia, menurut Benedict Anderson, kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok massa.¹²

Perlu disampaikan di sini bahwa yang dimaksud sebagai budaya politik adalah seperangkat norma dasar yang dipandang sebagai sebuah kewajiban, dan menjadi pegangan dalam kehidupan berpolitik. Budaya politik merupakan bagian dari budaya itu sendiri, yang secara umum berarti kumpulan pengetahuan yang membentuk pola ciri tingkah laku kemasyarakatan, yang pada akhirnya menjadi kunci atas perilaku individu.¹³ Beberapa pakar ilmu politik mengartikan budaya politik dalam sebuah definisi yang ringkas dan padat, yakni orientasi atau seperangkat cara berfikir sekelompok warga negara terhadap politik dan pemerintahan.¹⁴ Adapun ideologi adalah seperangkat keyakinan yang dipengaruhi oleh budaya politik dan kemudian kerap memberikan pengaruh terhadap tuntunan berpikir dan berperilaku oleh sekelompok orang, partai atau negara dalam menganalisis sebuah fenomena politik dan menuntun penganutnya menuju sesuatu yang dianggap ideal. Adapun perilaku politik mengacu pada sebuah pola tingkah laku aktor-aktor politik baik yang didasari oleh budaya, ideologi, seperangkat norma maupun kepentingan politik dalam sebuah sistem politik.

Terkait dengan inti dari budaya politik pada akhirnya terkait dengan norma dan nilai-nilai dasar yang dijadikan pegangan aktivitas berpolitik, salah satu kajian yang cukup relevan dalam ranah budaya politik ini adalah kajian mengenai politik aliran. Kajian politik aliran memiliki asumsi dasar kuatnya pengaruh ideologi politik dalam menentukan perilaku politik seseorang termasuk perilaku memilih. Pembahasan politik aliran tidak dapat dilepaskan dalam sebuah batasan, yakni keyakinan dan tingkah laku politik yang dibentuk oleh latar belakang keyakinan ideologi maupun landasan primordial tertentu. Pandangan ini kerap melihat sektarianisme sebagai sesuatu yang “given” dan terkait dengan persoalan hegemonik, yakni sebagai sesuatu yang memengaruhi alam bawah sadar dan pada gilirannya turut menentukan preferensi politik.¹⁵

¹² Sumartono, S. (2018). Budaya Politik Dalam Masyarakat Pragmatis. LUGAS Jurnal Komunikasi, 2(1), 20-26.

¹³ Plano, Jack C., Riggs, Robert E. dan Robin, Helena S.n1985. Kamus Analisa Politik. Jakarta. Rajawali Press hal 51-53

¹⁴ Almond, Gabriel A. dan Verba, Sidney. 1963. The Civic Culture: The Political Attitudes and Democracy in Five Nations. New Jersey: Princeton University Press. hal.90-92

¹⁵ Noor, F. (2016). Perilaku politik pragmatis dalam Kehidupan politik Kontemporer: Kajian atas menyurutnya peran ideologi politik di Era reformasi. Masyarakat Indonesia, 40(1), 57-74.

Terjadinya pergeseran dalam perilaku pemilih yang “suka duit” tidak semata-mata karena persoalan pada sistem pemilihannya tetapi banyak faktor yang harus dibenahi terutama bagaimana memperbaiki kualitas pendidikan politik masyarakat yang merupakan akar dari permasalahan tersebut. Oleh sebab itu yang paling bertanggungjawab dalam hal tersebut adalah para pakar politik, lembaga-lembaga masyarakat yang berfokus pada polling pendapat, partai-partai politik, organisasi masyarakat dan pihak pemerintah. Mereka harus lebih intensif dalam menyosialisasikan tema “Berpolitik Yang Beretika” apakah dalam bentuk seminar, panel diskusi, simposium, dialog interaktif di TV, dan kegiatan-kegiatan lain yang disponsori oleh pemerintah, agar nantinya masyarakat punya bahan-bahan masukan yang nantinya dapat dijadikan referensi dalam berdiskusi diantara mereka dan bukan lagi didasari oleh rasa dendam dari perilaku-perilaku pemimpin sebelumnya dan saat ini, jadi semuanya didasarkan atas pertimbangan yang ilmiah dan asas manfaat.¹⁶

D. Kesimpulan

Demokrasi merupakan salah satu sistem politik dan ideology politik yang banyak dianut dan digunakan oleh banyak negara. Sehingga demokrasi menjai sistem politik dan ideology mainstream yang memang banyak digunakan. Indonesia sendiri mulai menerapkan demokrasi secara procedural pasca reformasi tahun 1998. Pelaksanaan pilpres langsung, pileg, pilkada bahkan Pilkada adalah suatu hal yang memang nyata dihadapi masyarakat Indonesia pasca orde baru. Aplikasi nyata dalam demokrasi tersebut tentu punya suatu dampak memang menjadi suatu persoalan lain ditengah konsep dan ide-ide demokrasi yang semuanya seolah pro rakyat. Dengan pelaksanaan pemilu diberbagai segment dan tingkatan tadi ada suatu kenyataan bahwa demokrasi tersebut menimbulkan corak baru dalam politik modern yakni persoalan politik transaksional yang berhimpitan dengan pragmatism masyarakat yang akan berujung pada politik biaya tinggi yang selama ini mungkin banyak kita saksikan. Akar persoalan dalam politik transaksional seperti banyak dijelaskan diatas lebih pada unsur kepentingan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan hal tersebut juga diamini oleh beberapa praktisi dan teori dari pemikir politik semisal Lasswell. Dengan kondisi politik transaksional tadi diperparah dengan adanya budaya politik pragmatis dari masyarakat Indonesia yang secara tentu akan membuat demokrasi menjadi geser dan dan laur cita-citanya, sikap pragmatis tersebut bisa saja karena tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah sehingga persoalan money politik tidak bisa dihindari bahwa menular seperti wabah virus dari pusat sampai desa

E. Daftar Kepustakaan

- Hadiwinata, B. S. (2005). Civil Society: Pembangun dan Sekaligus Perusak Demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(1), 1-22.
- Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. *Notarius*, 13(1), 138-153.
- Liata, N. (2020). Relasi pertukaran sosial antara masyarakat dan partai politik. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 1(1), 79-95.
- H.M. Abdul Khaliq, Perilaku Politik Transaksional (Menggagas Fenomena Praktek Politik Uang Dalam Pemilu), h. 86. <http://manarulquran.unsiq.ac.id/index.php/manarul/article/view/15>. (Diakses 10 Januari 2024).

¹⁶ Jackson, Karl D, 1978. *The Political Implications of Structure and Culture in Indonesia*, California : University of California hal. 67-68

- Solihah, R. (2016). Politik transaksional dalam pilkada serentak dan implikasinya bagi pemerintahan daerah di Indonesia. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1), 97-109.
- MARETHA, T. A. (2020). *POLITIK TRANSAKSIONAL DAN RASIONALITAS PEMILIH DALAM PILPRES 2019 DI KECAMATAN KARANGNUNGAL* (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
- Djauhari.2011."Problematika Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Dalam perspektif Sosiologis)". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011.Fitriyah.2012. "Fenomena Politik Uang dalam Pilkada".*Jurnal Politik* Vol. 3, No. 1 April 2012.
- Ghifari, M. S., & Sari, C. M. A. (2019). *PRAKTIK POLITIK TRANSAKSIONAL PADA SISTEM DESENTRALISASI ASIMETRIS DI ACEH* (Studi Analisis 10 Tahun Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Periode 2008/2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 4(3).
- Pagala, H. A., & SHI, M. (2021). *Politik Transaksional*. Bening Media Publishing. Hal.45-47
- AAGN Ari Dwipayana, "Demokrasi Biaya Tinggi. Dimensi Ekonomi Dalam Demokrasi Elektoral di Indonesia Pascar Orde Baru", *Jurnal FISIPOL UGM*, Vol. 12 No. (3 Maret 2009), h. 267.<https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10971>. (Diakses (12 Agustus 2018). Lihat juga. Agus Rahardjo, "Biaya Politik Tinggi Penyebab Demokrasi ransaksional"
- Hasbi Ash-Shiddiqiy, *Koleksi Hadis Hukum*, Juz IX (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 457-459.
- Sumartono, S. (2018). *Budaya Politik Dalam Masyarakat Pragmatis*. LUGAS *Jurnal Komunikasi*, 2(1), 20-26.
- Plano, Jack C., Riggs, Robert E. dan Robin, Helena S.n1985. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta. Rajawali Press hal 51-53
- Almond, Gabriel A. dan Verba, Sidney. 1963. *The Civic Culture: The Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. New Jersey: Princeton University Press. hal.90-92
- Noor, F. (2016). *Perilaku politik pragmatis dalam Kehidupan politik Kontemporer: Kajian atas menyurutnya peran ideologi politik di Era reformasi*. *Masyarakat Indonesia*, 40(1), 57-74.
- Jackson, Karl D, 1978. *The Political Implications of Structure and Culture in Indonesia*, California : University of California hal. 67-68